

## EFEKTIFITAS PELAKSANAAN STANDAR PROSES (PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI NO.22 TAHUN 2016) DALAM PEMBELAJARAN PPKn

N.N. Erawati<sup>1</sup>, I.G.N. Pujawan<sup>2</sup>, N.M.S. Mertasari<sup>3</sup>

Program Studi Penelitian dan Evaluasi Pendidikan  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Singaraja, Indonesia

e-mail: [erawati@undiksha.ac.id](mailto:erawati@undiksha.ac.id)<sup>1</sup>, [ngurah.pujawan@undiksha.ac.id](mailto:ngurah.pujawan@undiksha.ac.id)<sup>2</sup>,  
[srimerasarinimade@undiksha.ac.id](mailto:srimerasarinimade@undiksha.ac.id)<sup>3</sup>

### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan standar proses (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 22 Tahun 2016) dalam pembelajaran PPKn pada siswa kelas VII SMP Swasta Se- Kota Denpasar. Model evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah model CIPP yang terdiri dari konteks, input, output dan produk. Obyek dalam penelitian ini adalah seluruh SMP Swasta Se-Kota Denpasar yang melaksanakan Kurikulum 2013 dengan jumlah 4 sekolah. Subyek penelitian terdiri dari guru yang mengajar mata pelajaran PPKn sebanyak 8 orang. Pengumpulan data pelaksanaan standar proses menggunakan metode kuesioner, dokumentasi, wawancara dan observasi. Data penelitian dianalisis secara deskriptif kuantitatif. Skor hasil kuesioner dikonversi kedalam pedoman kriteria penggolongan pelaksanaan standar proses, sedangkan efektifitas standar proses dianalisis dengan menggunakan nilai T-scor dan penentuan efektivitas berdasarkan Diagram Glickman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan standar proses pembelajaran PPKn pada siswa tingkat pertama SMP Swasta se- Kodya Denpasar ditinjau dari dimensi konteks, input, output dan produk adalah cukup efektif. Hasil penelitian diketahui bahwa hambatan utama dalam menjalankan kurikulum 2013 adalah pada aspek pengelolaan kelas kendala yang dihadapi adalah kurangnya kesiapan guru untuk mengikuti perubahan proses pembelajaran dalam kurikulum 2013, sebagian besar guru mengeluhkan rumitnya proses penilaian dengan berbagai kriteria siswa.

**Kata Kunci:** Efektivitas; Model CIPP; Pembelajaran Kewarganegaraan; Standar Proses

### Abstract

*The purpose of this study was to determine the effectiveness of the implementation of process standards (Regulation of the Minister of Education and Culture of the Republic of Indonesia No. 22 of 2016) in learning Civics in class VII students of Private Junior High Schools in Denpasar City. The evaluation model used in this study is the CIPP model which consists of context, input, output, and product. The objects in this study were all private junior high schools in Denpasar City that implemented the 2013 Curriculum in a total of 4 schools. The research subjects consisted of 8 teachers who taught Civics subject subjects. Collecting data on the implementation of the standard process using the method of questionnaires, documentation, interviews, and observations. The research data were analyzed descriptively and quantitatively. The score of the results of the questionnaire was converted into a guideline for the classification criteria for the implementation of the standard process, while the effectiveness of the standard process was analyzed using the T-score value and the determination of effectiveness was based on the Glickman diagram. The results showed that the implementation of the standard Civics learning process for the first-year students of private junior high schools throughout Denpasar City in terms of context, input, output, and product dimensions was quite effective. The results of the study found that the main obstacle in implementing the 2013 curriculum was in the aspect of classroom management. The obstacle faced was the lack of teacher readiness to follow changes in the learning process in the 2013 curriculum, most teachers complained about the complexity of the assessment process with various student criteria.*

**Keywords:** Effectiveness CIPP Model; Citizenship Learning; Process Standards

## PENDAHULUAN

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa visi pendidikan nasional adalah terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa. Dalam mewujudkan hal tersebut, maka dilakukan berbagai upaya salah satunya dengan ditetapkannya Permendiknas No. 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan, dan Permendiknas No. 64 Tahun 2013 yang mengatur tentang Standar Isi Lulusan, maka satuan pendidikan dasar dan menengah wajib mengembangkan dan melaksanakan Kurikulum 2013 (Gede dkk., 2013). Melalui upaya tersebut pemerintah berharap, aturan ini dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan proses pendidikan yang bermuara peningkatan kualitas pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta pengembangan potensi peserta didik. Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan maka salah satu standar yang harus dikembangkan adalah standar proses untuk seluruh mata pelajaran termasuk diantaranya mata pelajaran Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan (PPKn) (Rahmayani, 2016).

Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan (PPKn) merupakan salah satu mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri sebagai warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945 (Oktaviani & Wulandari, 2019). Untuk itulah PPKn dikembangkan dalam tradisi *Citizenship Education* yang tujuannya sesuai dengan tujuan nasional negara (Pratiwi dkk., 2018). Namun, secara umum tujuan mengembangkan PPKn adalah agar setiap warga negara menjadi warga negara yang baik (*to be good citizens*), yakni warga yang memiliki kecerdasan (*Civic Intelligence*) baik intelektual, emosional, sosial, maupun spiritual; memiliki rasa bangga dan tanggung jawab (*Civic Responsibility*); dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (*Civic*

*Participation*) agar tumbuh rasa kebangsaan dan cinta tanah air (Pratiwi et al., 2018). Selain itu, kedudukan PPKn dalam proses demokratisasi adalah dalam rangka transformasi nilai-nilai demokrasi. Sejalan dengan hal tersebut, PPKn sangat penting diterapkan untuk mendidik generasi bangsa untuk secara sukarela mengingatkan diri pada norma atau nilai-nilai moral (Yulianti et al., 2020). PPKn lebih bersifat interdisipliner (antar bidang) bukan monodisipliner, karena kumpulan pengetahuan yang membangun ilmu kewarganegaraan ini diambil dari disiplin ilmu, seperti ilmu politik, ilmu hukum, ekonomi, psikologi, sosiologi, administrasi negara, tata negara, sejarah, filsafat dan berbagai kajian lainnya yang berasal dari nilai budi pekerti, hak-hak asasi manusia dengan penekanan kepada hubungan antara warga dengan pemerintah, serta hubungan antar negara (Yulianti et al., 2020).

Terkait dengan pentingnya peran PPKn dalam menentukan arah dan tujuan pendidikan, yang ditekankan pada pembentukan sikap dan pengembangan kecerdasan atau intelektual (pengetahuan), serta pengembangan keterampilan anak sesuai dengan kebutuhannya, telah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mewujudkan hal tersebut (I Gd Angga Supriana & , Sukadi, 2018). Upaya penyempurnaan kurikulum terus dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Adanya Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan, memperlihatkan bahwa dunia pendidikan kita dituntut untuk berbenah (Susanti, 2017). Berikutnya dengan ditetapkannya Permendiknas No. 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan, dan Permendiknas No. 64 Tahun 2013 yang mengatur tentang Standar Isi Lulusan, maka satuan pendidikan dasar dan menengah wajib mengembangkan dan melaksanakan Kurikulum 2013

(Oktaviani & Wulandari, 2019). Melalui upaya tersebutlah pemerintah berharap dapat dibentuk suatu pedoman yang bisa dijadikan rujukan bagaimana seharusnya proses pendidikan berlangsung, yang bermuara pada proses pengembangan kemampuan dan pembentukan watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Upaya pemerintah tersebut tentu dimaksudkan untuk mewujudkan pendidikan nasional yang berkualitas, dimana semua komponen yang bergerak di dunia pendidikan harus memiliki visi, misi dan strategi yang tepat untuk memajukan pendidikan itu sendiri (Nurhasni, 2017). Untuk melaksanakan proses tersebut maka sosok guru yang memiliki keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan kompetensi dan kreatifitas peserta didik sangat diperlukan. Hal ini mengisyaratkan perubahan paradigma pendidikan, dari paradigma pengajaran menuju paradigma pembelajaran (Nurfadilah & Nani, 2019). Pembelajaran yang merupakan proses interaksi antara peserta didik dengan guru dan sumber belajar pada sebuah lingkungan belajar. Proses pembelajaran perlu direncanakan, dilaksanakan, dinilai dan diawasi agar terlaksana secara efektif dan efisien (Yulianti et al., 2020). Hal tersebut tentu harus sejalan dengan Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi, maka prinsip pembelajaran yang digunakan ialah : (1) dari peserta didik diberi tahu menuju peserta didik mencari tahu; (2) dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar; (3) dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah; (4) dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi; (5) dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu; (6) dari

pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multi dimensi; (7) dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif; (8) peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisik (*hardskills*) dan keterampilan mental (*softskills*); (9) pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat; (10) pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan (*ing ngarso sung tulodo*), membangun kemauan (*ing madyo mangun karso*), dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran (*tut wuri handayani*); (11) pembelajaran yang berlangsung di rumah, di sekolah, dan dimasyarakat; (12) pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas; (13) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran; dan (14) Pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta didik (Yulianti et al., 2020).

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan maka salah satu standar yang dikembangkan adalah standar proses. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai kompetensi lulusan. Standar proses ini ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 65 tahun 2013 pada tanggal 4 Juni 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Allejar, 2017).

Terkait dengan hal di atas, dikembangkan standar proses yang sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan, sasaran pembelajaran mencakup pengembangan ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dielaborasi untuk setiap satuan pendidikan. Ketiga ranah kompetensi tersebut memiliki lintasan perolehan (proses psikologis) yang berbeda. Sikap

diperoleh melalui aktivitas “menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan”. Pengetahuan diperoleh melalui aktivitas “mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, mencipta”. Keterampilan diperoleh melalui aktivitas “mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta”. Karakteristik kompetensi beserta perbedaan lintasan perolehan turut serta mempengaruhi karakteristik standar proses. Untuk memperkuat pendekatan ilmiah (*scientific*), tematik terpadu (tematik antar mata pelajaran), dan tematik (dalam suatu mata pelajaran) perlu diterapkan pembelajaran berbasis penyingkapan/penelitian (*discovery/inquiry learning*) (Jamaluddin & Faroh, 2020). Untuk mendorong kemampuan peserta didik untuk menghasilkan karya kontekstual, baik individual maupun kelompok maka sangat disarankan menggunakan pendekatan pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (Delita, 2017). Untuk dapat melaksanakan pembelajaran PPKn di SMP yang sesuai dengan hakekat mata pelajaran PPKn dan Standar Kompetensi Lulusan serta Standar Isi dalam Kurikulum 2013, bukanlah suatu pekerjaan yang mudah (Pratiwi et al., 2018). Pada dasarnya dapat dikatakan bahwa kegiatan mengajar PPKn kepada pelajar tingkat SMP bukanlah perkara yang gampang. Untuk itulah maka pelaksanaan Standar Proses yang mencakup kriteria minimal proses pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah di seluruh Indonesia menjadi sangat penting perannya untuk mewujudkan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi (I Gede Angga, Supriana et al., 2020).

Standar proses mencakup empat hal yaitu perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran (Gede et al., 2013). Pelaksanaan standar proses pembelajaran PPKn pada siswa tingkat pertama SMP pelaksana kurikulum 2013 di Kodya Denpasar perlu mendapat

perhatian khusus dengan melakukan evaluasi apakah standar proses sudah berjalan secara efektif atau belum. (Khairani Miftahul, Sutisna, 2019).

Berkaitan dengan pelaksanaan standar proses pada pembelajaran PPKn sesungguhnya sangat bijaksana bila dilakukan evaluasi terhadap langkah-langkah yang telah dijalani (Pratiwi et al., 2018). Dengan melakukan hal itu kita dapat memilah hal-hal yang baik dari sekumpulan tindakan yang telah dilakukan dan merevisi rencana yang belum terlaksana. Untuk itu pelaksanaan standar proses pada pembelajaran PPKn di SMP pelaksana kurikulum 2013 sangat penting untuk dievaluasi. Dari evaluasi yang ini diharapkan akan diperoleh *feedback* untuk perbaikan program tersebut, sehingga keunggulan-keunggulan program tersebut dapat dilanjutkan dan kelemahan-kelemahan program tersebut dapat dieliminasi untuk kesempurnaan program selanjutnya (Rizka et al., 2018). Jika pelaksanaan pada standar proses tidak dievaluasi maka satuan pendidikan tidak akan mengetahui keberhasilan dari standar proses yang telah di rancang di tetapkan pada satuan pendidikan tersebut, sehingga tidak diketahui keberhasilan ataukah belum berhasilnya standar yang telah di tetapkan acuannya. Untuk mengetahui efektifitas hal tersebut maka dilakukan kegiatan evaluasi program. Adapun pelaksanaan evaluasi program ini secara keseluruhan menggunakan pendekatan model CIPP (Mufid, 2020). Dalam evaluasi tentang efektifitas pelaksanaan standar proses dalam pembelajaran PPKn ini menggunakan evaluasi konteks, input, proses, produk. Dipilihnya model evaluasi ini, sesuai dengan hasil penelitian yang diungkapkan oleh Surya (2011) dan Arsana (2011), dari hasil evaluasi tersebut dapat dijadikan dasar penentu keputusan program berikutnya (Gede et al., 2013). Apakah program dapat dilaksanakan terus dengan peningkatan mutu atau perlu demi kesempurnaan program.

## METODE

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif, yaitu suatu jenis penelitian yang dirancang untuk

memperoleh informasi tentang status gejala jenis penelitian dilakukan. Fokus penelitian ini adalah melakukan evaluasi program terhadap pelaksanaan standar proses pada mata pelajaran PPKn. Obyek dalam penelitian ini adalah seluruh SMP Swasta Se-Kota Denpasar yang melaksanakan Kurikulum 2013 dengan jumlah 4 sekolah yaitu SMP PGRI 2 Ddenpasar, SMP Cipta Dharma, SMP PGRI 6 Denpasar dan SMP PGRI 5 Denpasar. Pengumpulan data pelaksanaan standar proses menggunakan metode kuesioner, dokumentasi, wawancara dan observasi. Sumber data terdiri dari guru, kepala sekolah, dokumen perangkat pembelajaran serta proses kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan siswa. Data penelitian dianalisis secara deskriptif kuantitatif. Skor hasil kuesioner dikonversi kedalam pedoman kriteria penggolongan pelaksanaan standar proses, sedangkan efektifitas standar proses dianalisis dengan menggunakan nilai T-scor dan penentuan efektifitas berdasarkan Diagram Glickman. *T-score* merupakan angka skala yang menggunakan mean dan standar deviasi (Oktaviani & Wulandari, 2019)). Analisis *T-score* digunakan untuk mengetahui perolehan skor tiap responden pada keseluruhan variabel (Konteks, Input, Proses, dan Produk). Dalam analisis pada masing-masing variabel konteks, input, dan proses diarahkan pada aplikasi kurve normal. Data yang berada diatas daerah

penerimaan diberi tanda positif (+), sedangkan data yang berada dibawah daerah penerimaan diberi tanda negatif (-). Cara untuk mengetahui hasil akhir dari masing-masing variabel dihitung dengan menjumlahkan skor positif (+) dan skor negatif (-). Jika skor positifnya lebih banyak dari pada jumlah skor negatifnya berarti hasilnya positif Skor + > Skor - = (+). Begitu sebaliknya, jika jumlah skor positifnya lebih kecil atau sama dengan jumlah skor negatifnya, maka hasilnya adalah negatif Skor + ≤ Skor - = (-)

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasi perhitungan didapatkan variabel konteks hasilnya positif, variabel input hasilnya positif, variabel proses hasilnya negatif, dan variabel produk hasilnya positif (C I P P = + + - +), maka efektifitas pelaksanaan standar proses pembelajaran PPKn pada siswa tingkat pertama SMP Swasta se-Kodya Denpasar termasuk pada kategori cukup efektif. Atau bila kategori CIPP = + + - + dibawa ke dalam kuadran model Glickman, maka efektifitas pelaksanaan standar proses pembelajaran PPKn pada siswa tingkat pertama SMP Swasta se-Kodya Denpasar terletak pada Kuadran II. Untuk lebih jelasnya mengenai kuadran model Glickman, tentang efektifitas pelaksanaan standar proses pembelajaran PPKn pada siswa tingkat pertama SMP Swasta se- Kodya Denpasar sebagai berikut

<table border="1"> <tr><th colspan="4">Kuadran II</th></tr> <tr><th>C</th><th>I</th><th>P</th><th>P</th></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>-</td></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>-</td><td>+</td></tr> <tr><td>+</td><td>-</td><td>+</td><td>+</td></tr> <tr><td>-</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> <tr><td colspan="4" style="text-align: center;">CUKUP EFEKTIF</td></tr> </table>		Kuadran II				C	I	P	P	+	+	+	-	+	+	-	+	+	-	+	+	-	+	+	+	CUKUP EFEKTIF				<table border="1"> <tr><th colspan="4">Kuadran I</th></tr> <tr><th>C</th><th>I</th><th>P</th><th>P</th></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr> <tr><td colspan="4" style="text-align: center;">EFEKTIF</td></tr> </table>		Kuadran I				C	I	P	P	+	+	+	+	EFEKTIF																											
Kuadran II																																																																							
C	I	P	P																																																																				
+	+	+	-																																																																				
+	+	-	+																																																																				
+	-	+	+																																																																				
-	+	+	+																																																																				
CUKUP EFEKTIF																																																																							
Kuadran I																																																																							
C	I	P	P																																																																				
+	+	+	+																																																																				
EFEKTIF																																																																							
<table border="1"> <tr><th colspan="4">Kuadran IV</th></tr> <tr><th>C</th><th>I</th><th>P</th><th>P</th></tr> <tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td colspan="4" style="text-align: center;">TIDAK EFEKTIF</td></tr> </table>		Kuadran IV				C	I	P	P	-	-	-	-	TIDAK EFEKTIF				<table border="1"> <tr><th colspan="4">Kuadran III</th></tr> <tr><th>C</th><th>I</th><th>P</th><th>P</th></tr> <tr><td>+</td><td>+</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>-</td><td>+</td><td>+</td><td>-</td></tr> <tr><td>-</td><td>-</td><td>+</td><td>+</td></tr> <tr><td>+</td><td>-</td><td>-</td><td>+</td></tr> <tr><td>+</td><td>-</td><td>+</td><td>-</td></tr> <tr><td>-</td><td>+</td><td>-</td><td>+</td></tr> <tr><td>+</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>-</td><td>+</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>-</td><td>-</td><td>+</td><td>-</td></tr> <tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>+</td></tr> <tr><td colspan="4" style="text-align: center;">KURANG EFEKTIF</td></tr> </table>		Kuadran III				C	I	P	P	+	+	-	-	-	+	+	-	-	-	+	+	+	-	-	+	+	-	+	-	-	+	-	+	+	-	-	-	-	+	-	-	-	-	+	-	-	-	-	+	KURANG EFEKTIF			
Kuadran IV																																																																							
C	I	P	P																																																																				
-	-	-	-																																																																				
TIDAK EFEKTIF																																																																							
Kuadran III																																																																							
C	I	P	P																																																																				
+	+	-	-																																																																				
-	+	+	-																																																																				
-	-	+	+																																																																				
+	-	-	+																																																																				
+	-	+	-																																																																				
-	+	-	+																																																																				
+	-	-	-																																																																				
-	+	-	-																																																																				
-	-	+	-																																																																				
-	-	-	+																																																																				
KURANG EFEKTIF																																																																							

Gambar 1. Penerapan Evaluasi Proses Adaptasi Teori Glickman (1981) (Rushartatik et al., 2013)

Bilamana F+ dan F- pada variabel konteks, input, proses dan produk dijadikan dalam bentuk perbandingan, diperoleh persentase sebagai berikut. Pada variabel konteks dari 8 responden ternyata 5 memperoleh hasil positif dan 3 memperoleh hasil negatif dengan perbandingan 5:3, ini berarti bahwa persentase F+ = 62,5% dan persentase F- = 37,5%. Pada variabel input dari 8 responden ternyata 5 memperoleh hasil positif dan 3 memperoleh hasil negatif dengan perbandingan 5:3, ini berarti bahwa persentase F+ = 62,5% dan persentase F- = 37,5%. Pada variabel proses dari 8 responden ternyata 4

memperoleh hasil positif dan 4 memperoleh hasil negatif dengan perbandingan 4:4, ini berarti bahwa persentase F+ = 50% dan persentase F- = 50%. Dan pada variabel produk dari 8 responden ternyata 5 memperoleh hasil positif dan 3 memperoleh hasil negatif dengan perbandingan 5:3, ini berarti bahwa persentase F+ = 62,5% dan persentase F- = 37,5%. Mengenai persentase efektifitas pelaksanaan standar proses pembelajaran PPKn pada siswa tingkat pertama SMP Swasta se-Kodya Denpasar ditinjau dari dimensi konteks, input, proses dan produk dirangkum pada tabel berikut.

Tabel 1. Efektifitas Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran PPKn pada Siswa Tingkat Pertama SMP Swasta Se- Kodya Denpasar ditinjau dari Dimensi Konteks, Input, Proses dan Produk.

No.	Dimensi	Persentase Frekuensi (F)		Perbandingan	Kategori Kecenderungan	Kategori Kuadran
		+	-			
1	Konteks	62,5	37,5	5 : 3	+	Cukup
2	Input	62,5	37,5	5 : 3	+	Efektif
3	Proses	50	50	4 : 4	-	(Kuadran II)
4	Produk	62,5	37,5	5 : 3	+	

Berpijak dari hasil analisis data *T-Skor* ini dan selanjutnya dibawa ke dalam kuadran Efektifitas Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran PPKn model Glickman, dapat dikatakan bahwa: (1) Cukup efektifnya pelaksanaan standar proses pembelajaran PPKn pada siswa tingkat pertama SMP Swasta se- Kodya Denpasar ditinjau dari dimensi input, yang meliputi kemajuan ipteks, nilai dan harapan masyarakat, dukungan pemerintah dan masyarakat, kebijakan pemerintah, landasan yuridis, tuntutan ekonomi, tuntutan globalisasi, tuntutan pengembangan diri serta peluang output untuk sukses, (2) Cukup efektifnya pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran PPKn pada Siswa Tingkat Pertama SMP Swasta Se- Kodya Denpasar ditinjau dari dimensi konteks, yang meliputi proses pembelajaran, kurikulum, ketenagaan, dana, sarana dan prasarana, regulasi sekolah, organisasi sekolah, administrasi sekolah, serta budaya sekolah, (3) Cukup efektifnya pelaksanaan standar proses pembelajaran PPKn pada siswa tingkat pertama SMP

Swasta se- Kodya Denpasar ditinjau dari dimensi proses, yang meliputi evaluasi terhadap manajemen, kepemimpinan, dan proses belajar mengajar, (4) Cukup efektifnya pelaksanaan standar proses pembelajaran PPKn pada siswa tingkat pertama SMP Swasta se- Kodya Denpasar ditinjau dari dimensi produk, yang meliputi evaluasi terhadap efektifitas proses pembelajaran dan prestasi belajar siswa.

Berdasarkan analisis pada tabel di atas, menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan standar proses pembelajaran PPKn pada siswa tingkat pertama SMP Swasta se- Kodya Denpasar dapat dijelaskan dari variabel konteks 62,5% dengan kategori positif (+), variabel input dengan 62,5% dengan kategori positif (+), variabel proses 50% dengan kategori negatif (-), dan variabel produk 62,5% dengan kategori positif (+). Selanjutnya berpijak dari hasil analisis data *T-Skor* ini dan kuadran Efektifitas Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran PPKn model Glickman, diperoleh hasil perhitungan variabel konteks hasilnya

positif, variabel input hasilnya positif, variabel proses hasilnya negatif, dan variabel produk hasilnya positif (C I P P = + + - +), maka efektifitas pelaksanaan standar proses pembelajaran PPKn pada siswa tingkat pertama SMP Swasta se-Kodya Denpasar termasuk pada kategori cukup efektif. Berikut ini juga dijelaskan temuan-temuan penelitian untuk masing-masing variabel dengan berdasarkan analisis data, yaitu:

**Pertama**, pada dimensi konteks sudah cukup menunjukkan keefektifan dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan standar proses pembelajaran PPKn pada siswa tingkat pertama SMP Swasta se- Kodya Denpasar. Bila dilihat dari masing-masing dimensi, tampak bahwa pemerintah daerah dan lingkungan masyarakat menunjukkan dukungan terhadap pelaksanaan standar proses pembelajaran PPKn pada siswa tingkat pertama SMP Swasta se- Kodya Denpasar.

Berdasarkan uraian diatas dapat disampaikan argumentasi secara fakta yang menyebabkan pelaksanaan standar proses pembelajaran PPKn pada siswa tingkat pertama SMP Swasta se- Kodya Denpasar berjalan dengan cukup efektif karena secara geografis Kodya Denpasar merupakan daerah yang maju jika dilihat dari perkembangan ekonomi masyarakatnya serta perkembangan teknologi dan informasinya, maka dari itu dukungan pemerintah Kodya Denpasar dalam menentukan arah kebijakan dibidang pendidikan sangatlah jelas dan terarah, hal ini tentu berpengaruh pada pelaksanaan standar proses pembelajaran PPKn pada siswa tingkat pertama SMP Swasta se- Kodya Denpasar dimana setiap tenaga pendidik diberikan tunjangan berupa *insentif* setiap bulannya oleh pemerintah daerah guna memotivasi para pendidik untuk meningkatkan kinerjanya. Oleh karena itu Kodya Denpasar sangatlah pesat kemajuannya dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas dan kualitas pendidikan di daerah serta mampu menciptakan sumber daya manusia yang produktif. Sesuai yang diungkapkan pada penelitian sebelumnya bahwa peran masyarakat di daerah ini rata-rata memiliki

perhatian yang cukup tinggi terhadap kondisi anak didiknya, terlihat dari besarnya keterlibatan orang tua dalam pemenuhan kebutuhan sekolah anak didiknya yang berupa biaya dan sarana. Hal ini tentu memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektifnya proses pembelajaran yang dilakukan serta peningkatan kompetensi anak didiknya (Luma et al., 2020)CIPP.

**Kedua**, pada dimensi input sudah cukup menunjukkan keefektifan dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan standar proses pembelajaran PPKn pada siswa tingkat pertama SMP Swasta se-Kodya Denpasar. Bila dilihat dari masing-masing dimensi, tampak bahwa dukungan tenaga pendidik, sarana dan prasarana, pembiayaan, dan penerapan kurikulum tahun 2013 menunjukkan dukungan terhadap pelaksanaan standar proses pembelajaran PPKn pada siswa tingkat pertama SMP Swasta se- Kodya Denpasar. Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui, secara empiris yang menyebabkan pelaksanaan standar proses pembelajaran PPKn pada siswa tingkat pertama SMP Swasta se- Kodya Denpasar berjalan dengan cukup efektif karena dukungan tenaga pendidik yang bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugasnya di dalam mengimplementasikan standar proses dalam kegiatan pembelajaran di kelas, yang pada dasarnya tujuan dari penerapan standar proses adalah agar guru memahami tahap-tahap dalam pembelajaran sehingga terjadi peningkatan kualitas pembelajaran dikelas, proses pembelajaran menjadi interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas lulusan.

Selanjutnya peran sarana dan prasarana di semua sekolah yang dijadikan subjek penelitian sangatlah baik, hal ini dikarenakan rata-rata sekolah tersebut sudah berdiri diatas 10 tahun serta selalu mendapatkan perhatian yang

baik dari pemerintah daerah terkait pengadaan sarana yang menunjang proses pembelajaran di sekolah, jadi dapat dikatakan bahwa rata-rata sekolah SMP Swasta yang berada di Kodya Denpasar sudah dapat mempersiapkan sarana dan sarana pembelajaran yang optimal serta secara khusus mendukung pelaksanaan standar proses pembelajaran PPKn, hanya saja pengelolaan dan penggunaan berbagai sarana tersebut yang harus dikelola kembali karena peneliti menemukan banyak inventaris sekolah yang tidak bisa digunakan akibat rusak seperti *LCD proyektor*, layar OHP, dan yang lainnya.

Dari segi pembiayaan juga telah mendukung pelaksanaan standar proses pembelajaran, hal ini ditunjukkan dengan adanya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) baik dari tingkat daerah maupun pusat. Program BOS yang berupa pemberian dana langsung ke sekolah Swasta maupun swasta yang bertujuan untuk membantu sekolah memenuhi biaya operasional non personalia dan membantu siswa miskin dalam memenuhi kebutuhan biaya pendidikannya (Rizka et al., 2018). Selain program tersebut, pemerintah juga telah mencetuskan program wajib belajar 9 tahun dimana program ini sangat mendukung penyelenggaraan pendidikan dengan membebaskan biaya SPP pada sekolah menengah pertama. Dengan adanya kedua program ini tentunya pelaksanaan standar proses pembelajaran akan berjalan secara optimal, hal ini dikarenakan keseluruhan komponen pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan standar proses pembelajaran sudah dapat dipenuhi dengan biaya langsung dari pemerintah, seperti: penggunaan buku teks pelajaran, pembelian ATK yang digunakan untuk kegiatan sekolah, penggandaan soal dan lembar jawaban siswa dalam ulangan dan ujian, pembelian bahan habis pakai penyelenggaraan pembinaan ekstrakurikuler, penyelenggaraan uji kompetensi, dan penyusunan serta pelaporan.

Berikutnya pengaruh kurikulum menjadi salah satu komponen yang penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan pendidikan, khususnya di

Kodya Denpasar. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut, ada dua dimensi kurikulum, yang pertama adalah rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, sedangkan yang kedua adalah cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Dalam Salinan Lampiran Permendikbud No. 68 Tahun 2013 tentang Kurikulum SMP-MTs dijelaskan bahwa, Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia.

Pelaksanaan standar proses pembelajaran PPKn yang sesuai dengan hakikat kurikulum 2013 di Kodya Denpasar secara keseluruhan telah dilaksanakan oleh guru secara tepat dengan menerapkan sistem belajar berbasis penyingkapan/ penelitian (*discovery/ inquiry learning*) dimana hal ini dimaksudkan untuk dapat memperkuat pendekatan saintifik. Serta untuk mendorong peserta didik menghasilkan karya kreatif dan kontekstual, baik individual maupun kelompok, disarankan menggunakan pendekatan pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (*project based learning*) (Allejar, 2017). Berikutnya untuk penilaian proses pembelajaran PPKn seharusnya menggunakan pendekatan penilaian otentik (*authentic assesment*) yang menilai kesiapan siswa, proses, dan hasil belajar secara utuh. Hasil penilaian otentik dapat digunakan oleh guru untuk merencanakan program perbaikan (*remedial*), pengayaan (*enrichment*), atau pelayanan konseling. Selain itu, hasil penilaian otentik dapat digunakan sebagai bahan untuk memperbaiki proses pembelajaran sesuai dengan Standar



Penilaian Pendidikan. Selanjutnya dalam pengawasan oleh Kepala Satuan Pendidikan, Pengawas dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan telah melakukan pengawasan dalam rangka peningkatan mutu. Oleh karena itu dalam megimplementasikan kurikulum 2013 yang salah satunya dengan pelaksanaan standar proses pendidikan (Permendikbud RI No. 22 Tahun 2016) khususnya dalam pembelajaran PPKn bagi siswa SMP tingkat pertama, maka seorang guru harus melaksanakan empat hal berikut: (1) Perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang mengacu pada Standar Isi. Perencanaan pembelajaran meliputi penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dan penyiapan media dan sumber belajar, perangkat penilaian pembelajaran, dan skenario pembelajaran (Tsani et al., 2021). Penyusunan Silabus dan RPP disesuaikan pendekatan pembelajaran yang digunakan. (2) Pelaksanaan pembelajaran, dirancang dengan alokasi waktu jam tatap muka pembelajaran untuk SMP/ MTs ialah 40 menit, sedangkan jumlah jam yang diperoleh untuk mata pelajaran PPKn ialah 3 kali pertemuan perminggu. (3) Penilaian proses pembelajaran menggunakan pendekatan penilaian otentik (*authentic assesment*) yang menilai kesiapan siswa, proses, dan hasil belajar secara utuh. Keterpaduan penilaian ketiga komponen tersebut akan menggambarkan kapasitas, gaya, dan perolehan belajar siswa atau bahkan mampu menghasilkan dampak instruksional (*instructional effect*) dan dampak pengiring (*nurturant effect*) dari pembelajaran. Hasil penilaian otentik dapat digunakan oleh guru untuk merencanakan program perbaikan (*remedial*), pengayaan (*enrichment*), atau pelayanan konseling. Selain itu, hasil penilaian otentik dapat digunakasebagai bahan untuk memperbaiki proses pembelajaran sesuai dengan Standar Penilaian Pendidikan (Nurfadilah & Nani, 2019). (4) Pengawasan proses pembelajaran dilakukan melalui kegiatan pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, serta tindak lanjut secara berkala dan berkelanjutan. Pengawasan

proses pembelajaran PPKn di sekolah dilakukan oleh kepala satuan pendidikan dan pengawas.

**Ketiga**, pada dimensi proses juga sudah cukup menunjukkan keefektifan dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan standar proses pembelajaran PPKn pada siswa tingkat pertama SMP Swasta se- Kodya Denpasar, walaupun melalui analisis data ditemukan hasil positif. Bila dilihat dari masing-masing dimensi, tampak bahwa dukungan guru dalam manajemen dan kepemimpinan pembelajaran yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan pengawasan pembelajaran sudah dilaksanakan dengan cukup baik.

Sesuai dengan hakikat kurikulum 2013 guru telah mampu mengembangkan pembelajaran PPKn dengan penyempurnaan pola pikir sebagai berikut: (a) Pola pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi pembelajaran berpusat pada peserta didik. Peserta didik harus memiliki pilihan-pilihan terhadap materi yang dipelajari untuk memiliki kompetensi yang sama; (b) Pola pembelajaran satu arah (interaksi guru-peserta didik) menjadi pembelajaran interaktif (interaktif guru-peserta didik-masyarakat- lingkungan alam, sumber/media lainnya); (c) Pola pembelajaran terisolasi menjadi pembelajaran secara jejaring (peserta didik dapat menimba ilmu dari siapa saja dan dari mana saja yang dapat dihubungi serta diperoleh melalui internet); (c) Pola pembelajaran pasif menjadi pembelajaran aktif-mencari; (d) Pola belajar sendiri menjadi belajar kelompok (berbasis tim); (e) Pola pembelajaran alat tunggal menjadi pembelajaran berbasis alat multimedia; (f) Pola pembelajaran berbasis massal menjadi kebutuhan pelanggan (*users*) dengan memperkuat pengembangan potensi khusus yang dimiliki setiap peserta didik; (g) Pola pembelajaran ilmu pengetahuan tunggal (*monodiscipline*) menjadi pembelajaran ilmu pengetahuan jamak (*multidisciplines*); dan (h) Pola pembelajaran pasif menjadi pembelajaran kritis (Oktaviani & Wulandari, 2019). Selanjutnya tampak bahwa dukungan guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar meliputi kegiatan pendahuluan, inti dan

penutup juga sudah dilaksanakan dengan cukup baik. Hal ini dikarenakan pelaksanaan proses pembelajaran yang merupakan implementasi dari RPP, sudah mampu diimplementasikan oleh guru menjadi pola pembelajaran yang sempurna di dalam kelas, yaitu sebagai berikut: (a) Dalam kegiatan pendahuluan, guru sudah menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran; memberi motivasi belajar siswa secara kontekstual sesuai manfaat dan aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari, dengan memberikan contoh dan perbandingan lokal, nasional dan internasional; mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari; menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai; dan menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus. (b) Kegiatan Inti, menggunakan model pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran. Berikutnya untuk jenjang SMP digunakan pendekatan penyingkapan (*discovery*) dan/ atau pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (*project-based learning*). (c) Sesuai dengan karakteristik sikap, maka salah satu alternatif yang dipilih adalah proses afeksi mulai dari menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, hingga mengamalkan (Yulianti et al., 2020).

Seluruh aktivitas pembelajaran berorientasi pada tahapan kompetensi yang mendorong siswa untuk melakukan aktivitas tersebut. Pengetahuan dimiliki melalui aktivitas mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, hingga mencipta (Rahmayani, 2016). Keterampilan diperoleh melalui kegiatan mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta. Seluruh isi materi (topik dan subtopik) mata pelajaran yang diturunkan dari keterampilan harus mendorong siswa untuk melakukan proses pengamatan hingga penciptaan. Untuk mewujudkan keterampilan tersebut perlu melakukan pembelajaran yang

menerapkan modus belajar berbasis penyingkapan/ penelitian (*discovery/ inquiry learning*) dan pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (*project-based learning*). (d) Dalam kegiatan penutup, guru bersama siswa baik secara individual maupun kelompok melakukan refleksi dan untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan (Hari et al., 2021).

**Keempat**, pada dimensi produk sudah cukup menunjukkan keefektifan dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan standar proses pembelajaran PPKn pada siswa tingkat pertama SMP Swasta se- Kodya Denpasar. Bila dilihat dari masing-masing dimensi, tampak bahwa efektifitas proses pembelajaran PPKn sudah berjalan sesuai harapan. Hal ini tentu dipengaruhi oleh pelaksanaan standar proses yang efektif dimana guru sudah mampu merencanakan pembelajaran melalui pengerjaan RPP secara baik dan benar sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan pembelajaran dan penilaian proses pembelajaran di dalam kelas yang terus meningkat kualitasnya ditunjukkan dengan pembelajaran yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas lulusan. Selain itu perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran juga telah didukung oleh pengawasan dari kepala satuan pendidikan dan pengawas satuan pendidikan sehingga secara keseluruhan pelaksanaan standar proses pembelajaran PPKn dapat berjalan efektif serta sesuai dengan harapan yang diinginkan. Sedangkan dukungan dari prestasi belajar siswa terhadap keberhasilan pelaksanaan standar proses pembelajaran PPKn terlihat dari keberhasilan siswa dalam bidang akademik seperti tingginya perolehan rata-rata hasil nilai Ujian Tengah Semester (UTS) serta Ujian Akhir Semester (UAS) pada mata pelajaran PPKn, serta rendahnya kecenderungan pelaksanaan

program remedial yang dikarenakan sebagian besar siswa telah memperoleh nilai diatas Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Namun untuk keberhasilan prestasi belajar siswa dibidang non-akademik yang terkait dengan pembelajaran PPKn belum dapat ditemukan.

Secara khusus melalui observasi dan wawancara ditemukan kendala-kendala dalam proses pembelajaran PPKn yang dapat mempengaruhi pelaksanaan standar proses pembelajaran PPKn, yaitu sebagai berikut:

- 1) Masih adanya paradigma negatif bahwa mata pelajaran PPKn adalah mata pelajaran yang menjenuhkan dan cenderung tidak menyenangkan. Hal ini membuat peserta didik kurang termotivasi untuk mempelajarinya. Untuk itu dalam penerimaan masukan (input) peserta didik juga perlu mempertimbangkan tingkat motivasi anak saat mengikuti pembelajarannya di sekolah nanti.
- 2) Keterbatasan waktu pembelajaran di dalam jam sekolah. Hal ini sangat terasa bagi guru dalam melaksanakan proses penilaian untuk kompetensi pengetahuan, sikap dan keterampilan secara bersamaan. Guru cenderung merasa waktu 3 jam pelajaran (2 x 40 menit) sangatlah terbatas dan hanya cukup untuk proses pelaksanaan pembelajaran saja.
- 2) Jumlah siswa sebageaian besar lebih dari 32 orang per kelasnya, dimana rata-rata ditemukan terdiri atas 40 orang dalam satu kelas. Hal ini membuat guru tidak bisa memberikan tuntunan, bimbingan dan penilaian secara merata atau menyeluruh. Untuk itu diperlukan penerapan aturan yang tegas terkait penentuan jumlah siswa dalam satu kelas, sehingga memperoleh jumlah siswa yang proporsional dan akan sangat mempengaruhi perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan pengawasan pembelajaran agar sesuai dengan persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran yang tertian dalam standar proses.
- 3) Dua orang guru (25%) dari delapan orang guru dalam kelompok usia 50

tahun keatas, dimana pada usia tersebut seorang guru akan mengalami stagnasi inovasi dalam pembelajaran.

- 4) Tidak semua guru PPKn mampu dalam merencanakan, melaksanakan, menilai dan mengawasi proses pembelajaran PPKn secara penuh dan menyeluruh, hal ini tetap menjadi hambatan walaupun guru tersebut sudah mendapatkan kesempatan untuk mengikuti sosialisasi (pelatihan, workshop, seminar dan sebagainya) yang diselenggarakan oleh Pusat (Kementerian), Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten/ Kota tentang standar proses.
- 5) Kepala satuan pendidikan kurang memfasilitasi forum diskusi guru sebagai ajang tukar pengalaman serta pendesiminasian hasil pelatihan, workshop dan seminar kepada guru yang lain, sehingga masih banyak guru yang belum memahami tentang standar proses. Dengan belum pahamnya tentang standar proses serta sulitnya mengubah paradigma pendidikan dari paradigma pengajaran menuju paradigma pembelajaran, maka proses pembelajaran cenderung akan berpusat pada guru karena ketiadaan proses interaksi antara peserta didik dengan guru dan sumber belajar pada sebuah lingkungan belajar.

## PENUTUP

Berdasarkan serangkaian tahapan yang dilakukan untuk melakukan evaluasi terhadap standar proses di SMP Swasta Se-Kota Denpasar, dapat disimpulkan sebagai berikut.

- 1) Cukup efektifnya pelaksanaan standar proses pembelajaran PPKn pada siswa tingkat pertama SMP Swasta se-Kodya Denpasar ditinjau dari dimensi konteks, yang meliputi kemajuan ipteks, nilai dan harapan masyarakat, dukungan pemerintah dan masyarakat, kebijakan pemerintah, landasan yuridis, tuntutan ekonomi, tuntutan globalisasi, tuntutan pengembangan diri serta peluang output untuk sukses,
- 2) Cukup efektifnya pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran PPKn pada

Siswa Tingkat Pertama SMP Swasta Se- Kota Denpasar ditinjau dari dimensi input, yang meliputi proses pembelajaran, kurikulum, ketenagaan, dana, sarana dan prasarana, regulasi sekolah, organisasi sekolah, administrasi sekolah, serta budaya sekolah,

- 3) Cukup efektifnya pelaksanaan standar proses pembelajaran PPKn pada siswa tingkat pertama SMP Swasta se-Kodya Denpasar ditinjau dari dimensi proses, yang meliputi evaluasi terhadap manajemen, kepemimpinan, dan proses belajar mengajar,
- 4) Cukup efektifnya pelaksanaan standar proses pembelajaran PPKn pada siswa tingkat pertama SMP Swasta se-Kodya Denpasar ditinjau dari dimensi produk, yang meliputi evaluasi terhadap efektifitas proses pembelajaran dan prestasi belajar siswa.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Allejar, M. (2017). Pengaruh Implementasi Kebijakan Standar Proses Pendidikan terhadap Manajemen Kurikulum untuk Mewujudkan Efektivitas Pembelajaran. *Khazanah Akademia, Vol 1*, 39–48. <http://journal.uniga.ac.id/index.php/K/article/view/168>
- Delita, F. (2017). Penerapan Authentic Assesment Pada Mata Kuliah IPS Terpadu Semester Gasal Tahun Ajaran 2016/2017. *Jurnal Geografi*. <https://doi.org/10.24114/jg.v9i2.6970>
- Gede, I. W., Putra, A., Yudana, I. M., Suarni, N. K., Studi, P., Pendidikan, A., & Pascasarjana, P. (2013). Efektifitas Pelaksanaan Standar Proses (Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Ri No. 65 Tahun 2013) Dalam Pembelajaran Pkn Pada Siswa Tingkat Pertama Smp Negeri Se-Kabupaten Badung. *Administrasi Pendidikan, 5*(1). [https://ejournal-pasca.undiksha.ac.id/index.php/jurnal\\_ap/article/view/1406](https://ejournal-pasca.undiksha.ac.id/index.php/jurnal_ap/article/view/1406)
- Hari, K., Dewi, S., & Pramarta, I. N. B. (2021). The Effectiveness of Authentic Project-Based Assessment on the Online Learning System Toward Learning Result of Student Viewed from Critical Thinking Ability. *Proceedings of The 6th Asia-Pacific Education And Science Conference, AECon 2020*, <https://doi.org/10.4108/eai.19-12-2020.2309123>
- Jamaluddin, M., & Faroh, N. (2020). Developing authentic assessment: Project assessment on mathematics learning evaluation by using e-learning. *Math Didactic: Jurnal Pendidikan Matematika*. <https://doi.org/10.33654/math.v5i3.729>
- Khairani Miftahul, Sutisna, S. S. (2019). Analisis Pelaksanaan Kurikulum 2013 Ditinjau Dari Standar Proses Dalam Pembelajaran Ipa Kelas Vii Smp Al-Ulum Kota Medan. *Jurnal Biolokus Vol: 2 No.1 Januari – Juni 2019*. <https://media.neliti.com/media/publications/292801-studi-meta-analisis-pengaruh-video-pembe-7bf17271.pdf>
- Luma, M., Tola, A., & Hadirman, H. (2020). Evaluasi Implementasi K-13 Berdasarkan Model CIPP di SDN 2 Tabongo Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Ilmiah Iqra', 14*(2), 186. <https://doi.org/10.30984/jii.v14i2.1307>
- Mufid, M. (2020). Evaluasi Model Context, Input, Process and Product (CIPP) Program Baca Tulis Al-Qur'an di Institut Agama Islam Negeri Pekalongan. *Quality, 8*(1), 1. <https://doi.org/10.21043/quality.v8i1.6908>
- Nurfadilah, S., & Nani, R. (2019). Standar Proses Pendidikan Nasional: Implementasi dan Analisis Terhadap Komponen Guru Matematika pada Salah Satu SMP. *Jurnal Siliwangi: Seri Pendidikan, 5*(1), 35–43.
- Nurhasni. (2017). Belajar dan Mengajar Berdasarkan Standar Proses Pendidikan. *Bappeda, 03*, 53–59.
- Oktaviani, N. M., & Wulandari, I. (2019). Implementasi Standar Proses Dalam Kurikulum 2013 Di Sekolah Dasar. *Primary: Jurnal Pendidikan Guru*

- Sekolah Dasar*, 8(2), 182.  
<https://doi.org/10.33578/jpfkip.v8i2.7839>
- Pratiwi, S. E., Sulaimi, M., & Yuliatin, Y. (2018). Implementasi Pembelajaran PPKn Berdasarkan Kurikulum 2013 di SMP Negeri X Lingsar. *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, 5(2).  
<https://doi.org/10.29303/juridiksiam.v5i2.61>
- Rahmayani. (2016). Implementasi Manajemen Pembelajaran PPKn Kurikulum 2013. *Jurnal Manajer Pendidikan*, 10(2), 143–148.
- Rizka, M. A., Tamba, W., & Suharyani. (2018). Pelatihan Evaluasi Program Pendidikan Nonformal Bagi Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ( PKBM ) di Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Pendidikan*, 2(April), 15–23.
- Rushartatik, R., Dantes, N., & Suandana, G. A. (2013). Studi evaluatif pembelajaran tematik di kelas permulaan se- kecamatan kuta utara badung. *E-Journal Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha*, 4, 1–10.
- Supriana, I Gd Angga, & , Sukadi, N. S. (2018). *EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 MATA PELAJARAN PPKN PADA SMA NEGERI DI KECAMATAN BUSUNGBIU*. 2(2), 96–104.
- Supriana, I Gede Angga., Sukadi., & Suastika, I. N. (2020). Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Program Kurikulum 2013 DI SMP Negeri Se-Kota Serang. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(1), 35–46.  
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/23548/14372>
- Susanti, M. (2017). Implementasi Standar Proses Kurikulum 2013 Pada Pembelajaran Biologi Di Man Tanjungpinang. *הארץ*, 8.5.2017.
- Tsani, I., Arsyadana, A., Sufirmansyah, & Shafira, E. (2021). Evaluasi Model CIPP Pada Pembelajaran PAI dan Budi Pekerti di SMA Negeri 7 Kota Kediri. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(1), 17–45.
- Yulianti, E., Arafat, Y., & Wardiah3, D. (2020). *Analisis Standar Proses Dalam Pelaksanaan Pembelajaran Ppkn*. 5(2).